

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, Stara Press, Jakarta, 2017.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 1997.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi III, Jakarta 2002.
- Jimly Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006.

- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Imu Populer, Jakarta, 2008.
- Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum tata negara pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Ni'matu'l Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Nukthoh, Arfawie kurde, *Telaah kritis Teori negara hukum*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang undangan dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3, Bandung, 1989.

- R. Siti Zuhro dan Eko Prasjojo , *Kisruh Peraturan Daerah :Mengurai Masalah dan Solusinya*, Penerbit Ombak dan The Habibie Center, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta 2003.
- Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, Keretakupa, Makassar, 2017.
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fakusmedia, Bandung, 2009.
- Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Siswanto sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cet IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*, Noordhof, Jakarta, 1980.
- Soetandjo Wignosubroto, dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Government, Jakarta, 2005.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- 3) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

### C. Sumber lain

Ali Marwan Hsb, “*Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,*” 2019, 1–8, <https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97>.

Andi Bau Inggit, Abdul Razak, and Anshory Ilyas, “*HAKIKAT PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KOTA MAKASSAR The Essence of Regional Parliamentary Rules of the Order of Regional Parliament in Makassar City* Andi Bau Inggit ISSN 2252-7230 *PENDAHULUAN Indonesia Adalah Negara Hukum Yang Berbentuk Kesatuan*” 3, no. 1 (2014): 1–11.

Arifuddin Nurdin, “*Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah,*” *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76, <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.36>.

Armen Yasir, “*Hukum Perundang-Undangan,*” 2013, 102.

Atmaja, Made Nurmawati dan Mahendra Wija. “*Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.*” Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, 1–61.

Atmaja, Marhaendra Wija. “*Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*” 2016, 15.

Baskoro T, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2005.

Blog Segala and H A L Mengenai, “*Prinsip Pokok Negara Hukum*,” 2021, 1–5.

Botutihe, Darwin. “*Politik Pembentukan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945*.” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).  
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/893>.

Darwin Botutihe, “*Politik Pembentukan Hukum Pasca Amandemen UUD 1945*,” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012),  
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/893>.

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara, “*DEVELOPMENT OF REGULATORY AUTHORITY ANNULMENT OF An Analysis of Constitutional Court Decision*,” 2017, 217–34.

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=480:politik-perundangundangan&catid=100&Itemid=180](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=480:politik-perundangundangan&catid=100&Itemid=180) Diakses pada 10 April 2021 Pukul 16:58 WIB.

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> Diakses pada 12 April 2021 Pukul 21:28 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan-ini-penjelasan-presiden/> Diakses Pada 25 April 2021 Pukul 15:06 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2011-pembentukan-peraturan-perundangundangan#:~:text=Sistematisasi%20materi%20pokok%20dalam%20Undang,Pembentukan%20Peraturan%20Perundang%20Undang%20adalah%3A&text=partisipasi%20masyarakat%20dalam%20Pembentukan%20Peraturan,lembaga%20negara%20serta%20pemerintah%20lainnya.> Diakses pada 20 Maret 2021 Pukul 19:33 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> Diakses pada 19 April 2020 Pukul 12:55 WIB.

Inggit, Andi Bau, Abdul Razak, and Anshory Ilyas. “*HAKIKAT PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KOTA MAKASSAR The Essence of Regional Parliamentary Rules of the Order of Regional Parliament in Makassar City* Andi Bau Inggit ISSN 2252-7230 *PENDAHULUAN Indonesia Adalah Negara Hukum Yang Berbentuk Kesatuan*” 3, no. 1 (2014): 1–11.

Jimly Asshiddiqie, “*L’école de Palo Alto*,” *L’école de Palo Alto*, 2006, 1–17, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

Jumadi Jumadi, “*Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia*,” *Jurnal Hukum*

- Unsulbar 1, no. 1 (2018): 27–40, <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>.
- Luh, N I, Gede Astariyani, Program Doktor, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “*Delegasi Pengaturan Kepada Peraturan Gubernur Menjamin Kemanfaatan Dan Keadilan*,” 2017.
- Luis Enrique García Reyes, “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- M. Agus Santoso, “*Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Made Nurmawati dan Mahendra Wija Atmaja, “*Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*,” Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, 1–61.
- Marhaendra Wija Atmaja, “*Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*,” 2016.
- Michael A. Pangemanan, “*Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah*,” Lex Privatum 4, no. 8 (2016): 24–33.
- N I Luh et al., “*Delegasi Pengaturan Kepada Peraturan Gubernur Menjamin Kemanfaatan Dan Keadilan*,” 2017.



- Nurdin, Arifuddin. *“Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah.”* Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 1 (2020): 53–76.  
<https://doi.org/10.33096/aijih.v22i1.36>.
- Peraturan Perundang-undangan, *“Cara Glowing Nunggu Buka Ciri-Ciri Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Secara Umum Peraturan Perundang-Undangan,”* 2021, 1–5
- Santoso, M. Agus. *“Perkembangan Konstitusi Di Indonesia.”* Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013).  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>.
- Segala, Blog, and H A L Mengenai. *“Prinsip Pokok Negara Hukum,”* 2021, 1–5.
- Yarni, M, *Fungsi legislasi DPRD dalam kerangka otonomi: studi kasus DPRD kota Jambi dan DPRD kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 2010.